

BAB 2

KONTEKS HISTORIS MASYARAKAT KAMPUNG ADAT CIREUNDEU SEBELUM PERALIHAN PANGAN TAHUN 1918

2.1 Kondisi Geografis dan Sosial Kampung Adat Cireunde

Kondisi geografis Kampung Adat Cireunde menjadi salah satu aspek penting untuk memahami latar belakang kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam praktik kemandirian pangan yang berkembang kemudian. Secara administratif, Kampung Adat Cireunde saat ini berada di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Perubahan status administratif ini baru terjadi pada tahun 2001, seiring dengan pembentukan Kota Cimahi sebagai daerah otonom. Sebelum itu, wilayah Cireunde merupakan bagian dari Kabupaten Bandung yang memiliki cakupan wilayah lebih luas. Dengan demikian, kondisi geografis yang relatif tetap menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan perubahan batas administratif.¹⁷ Dalam konteks ini, ruang geografis dapat dipahami sebagai fondasi yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Lingkungan fisik yang tidak banyak berubah turut menjaga keberlangsungan tradisi yang ada. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kondisi geografis menjadi penting sebagai pijakan awal dalam melihat dinamika masyarakat Cireunde. Tidak hanya sebagai latar tempat, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi pola hidup dan pilihan ekonomi masyarakat.

Kampung Adat Cireunde secara administratif saat ini merupakan bagian dari RW 10, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Meskipun secara administratif wilayah ini telah masuk ke dalam area perkotaan, Masyarakat Cireunde tetap mempertahankan karakteristik pedesaan adat yang kuat. Kampung ini memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 93 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar 60 hektar dialokasikan sebagai kawasan hijau yang tidak boleh dibangun untuk permukiman. Dalam menunjang kemandirian dan kelestarian

¹⁷ Adnan dan Solihin, "Keyakinan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Adat Cireunde Kota Cimahi," *Jurnal Socio-Politica* 8, no. 1 (2018): hlm, 15-16.

lingkungannya, masyarakat adat membagi wilayah hutan mereka menjadi tiga zona tata ruang berbasis kearifan lokal. Pembagian tata ruang tersebut meliputi Hutan larangan yaitu hutan suci yang dilindungi secara ketat. Di kawasan ini, masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan menebang pohon atau merusak vegetasi di dalamnya. Hutan ini berfungsi krusial untuk menjaga ketersediaan air tanah bagi pemukiman bawah. Kemudian ada yang disebut Hutan Tutupan yaitu Kawasan hutan yang dijaga secara kolektif untuk kelangsungan dan perlindungan mata air agar tidak mengalami kekeringan. Terakhir ada Hutan baladahan, yaitu Kawasan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian aktif masyarakat. Di hutan baladahan inilah masyarakat Cireundeu mengolah komoditas pertanian utama mereka, yaitu singkong, yang menjadi motor penggerak ketahanan pangan lokal. Luas lahan yang secara khusus digunakan untuk perkebunan singkong ini adalah sekitar 30 hektar.¹⁸

Berdasarkan data sosiologis masyarakat setempat, RW 10 Kampung Cireundeu membawahi 5 Rukun Tetangga (RT). Total populasi masyarakat di wilayah ini tercatat sebanyak 1.377 jiwa yang terbagi ke dalam 413 Kepala Keluarga (KK). Secara demografis, jumlah populasi laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan dengan populasi perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem sosial di Cireundeu merepresentasikan bentuk sinergitas yang unik antara Lembaga Adat dan Lembaga Pemerintahan. Kedua struktur ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling berkolaborasi.¹⁹ Mata pencaharian utama masyarakat Adat Cireundeu berpusat pada sektor pertanian, khususnya budidaya singkong. Secara historis, komoditas ini bukan sekadar alternatif pangan, melainkan identitas sosial yang membedakan mereka dengan masyarakat di luar Cireundeu. Sejak tahun 1918, masyarakat Cireundeu telah mempraktikkan secara konsisten kebiasaan mengonsumsi beras singkong (rasi) dan melepaskan ketergantungan total dari beras padi. Hingga saat ini, terdapat sekitar 60 KK yang masih sangat konsisten hanya mengonsumsi rasi tanpa menyentuh beras padi sama sekali. Singkong diposisikan sebagai pilar kemandirian karena mereka tidak perlu membeli beras dari luar,

¹⁸ Hasil Wawancara Bersama ketua RW 10 Kampung adat Cireundeu bapak Cep Sutiana

¹⁹ *Ibid*

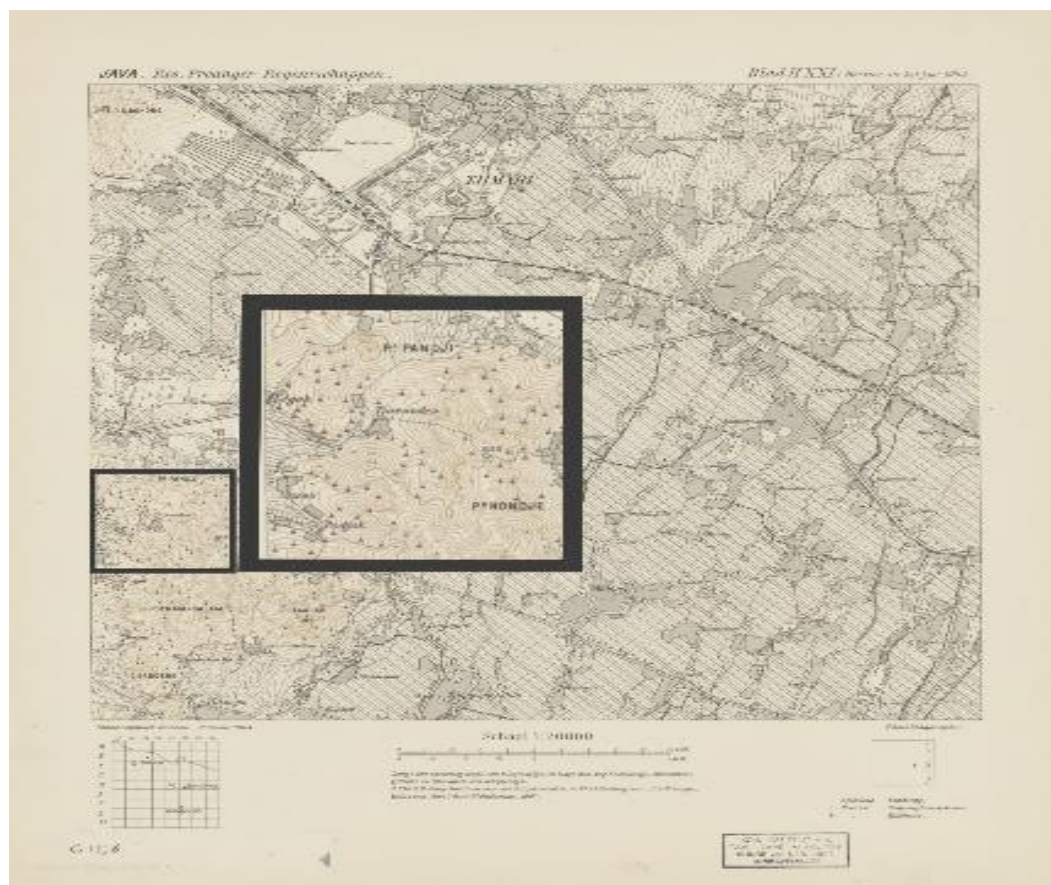
melainkan mencukupi kebutuhan perut dari apa yang mereka tanam sendiri di hutan baladahan.

Berdasarkan topografi, Kampung Adat Cireundeu berada pada wilayah yang cenderung berbukit dengan permukaan tanah yang tidak merata. Berdasarkan peta lama awal abad ke-20, terlihat adanya garis kontur yang cukup rapat di beberapa bagian wilayah tersebut. Garis kontur ini menunjukkan adanya perbedaan ketinggian yang cukup signifikan, sehingga wilayah Cireundeu memiliki karakter lahan yang bergelombang.²⁰ Kondisi ini secara langsung mempengaruhi pola pemanfaatan ruang oleh masyarakat. Lahan yang tidak datar membuat aktivitas pertanian tidak dapat dilakukan secara luas seperti di daerah persawahan. Sebaliknya, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi lahan yang terbatas dan cenderung berundak. Hal ini juga berpengaruh terhadap jenis tanaman yang dibudidayakan. Tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi tanah kering dan tidak rata menjadi pilihan yang lebih rasional. Selain itu, pola permukiman masyarakat juga mengikuti bentuk alam yang ada. Rumah-rumah tidak tersusun secara teratur, melainkan menyebar mengikuti kontur tanah. Pola seperti ini menunjukkan bahwa perkembangan permukiman berlangsung secara alami sehingga tidak ada indikasi perencanaan ruang yang kaku seperti di wilayah perkotaan modern. Dalam jangka panjang, kondisi ini membentuk kebiasaan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan. Akses antarwilayah kemungkinan tidak selalu mudah, terutama pada masa lalu. Hal ini memberi kesan bahwa wilayah Cireundeu relatif tidak terlalu terbuka. Namun justru dari kondisi tersebut, muncul pola kehidupan yang mandiri. Dengan demikian, topografi menjadi faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat Cireundeu.

Kondisi geografis Kampung Adat Cireundeu yang berada di kawasan perbukitan dengan topografi bergelombang memberikan pengaruh langsung terhadap pola produksi pangan masyarakat. Lahan pertanian yang tersedia sebagian besar berupa tanah kering dengan kemiringan tertentu sehingga tidak seluruhnya cocok untuk pengembangan sawah irigasi secara luas. Keterbatasan akses terhadap

²⁰ Analisis Berdasarkan *Peta Cireundeu tahun 1905*, Koleksi Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), No. Inventaris KK 028-01/030-11-08_097-04854-096.

sumber air yang stabil juga menyebabkan produktivitas tanaman padi relatif lebih rendah dibandingkan daerah dataran yang memiliki sistem pengairan memadai. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pola pertanian dengan kondisi lingkungan yang mereka hadapi. Karakteristik tersebut menjadikan wilayah Cireundeu mendukung pertumbuhan tanaman palawija, terutama singkong (*Manihot esculenta*). Tanaman ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lahan marginal, tidak memerlukan pengairan intensif, serta mampu bertahan pada musim kemarau yang panjang. Kemampuan singkong untuk tumbuh pada lahan berbukit menjadikannya pilihan yang lebih realistis dibandingkan padi sebagai sumber pangan utama masyarakat.



Gambar 2.1 Peta Cireundeu Tahun 1905²¹

Kondisi geografis Cireundeu yang berbukit dan tidak sepenuhnya mendukung pertanian sawah membentuk habitus masyarakat dalam menentukan

²¹ Ibid, Peta Cireundeu tahun 1905.

pola pangan yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep *habitus*. Bourdieu menjelaskan bahwa *habitus* merupakan seperangkat disposisi atau kecenderungan yang terbentuk melalui pengalaman hidup sehari-hari dan berlangsung secara terus-menerus dalam lingkungan sosial tertentu. Pengalaman kolektif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lahan pertanian sawah, ancaman krisis pangan, serta kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup secara perlahan membentuk pola pikir dan pola tindakan yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat Cireundeu. *Habitus* tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses historis yang panjang dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui praktik sosial sehari-hari. Selain itu, dalam perspektif moral ekonomi James C. Scott, masyarakat pedesaan cenderung mengutamakan keamanan subsistensi dibandingkan orientasi keuntungan ekonomi. Pemanfaatan tanaman yang tahan terhadap kondisi lahan kering menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menjaga stabilitas pangan keluarga dan komunitas.

Selain kondisi topografi, letak geografis Cireundeu juga memperlihatkan posisinya yang berada di antara jalur penghubung beberapa wilayah di sekitarnya. Dalam catatan trayek transportasi lama, wilayah ini termasuk dalam rute yang menghubungkan daerah seperti Ciwidey, Rancabali, hingga Cigombong. Hal ini menunjukkan bahwa Cireundeu sebenarnya tidak sepenuhnya terisolasi dari wilayah lain. Meskipun bukan pusat aktivitas, wilayah ini tetap berada dalam jaringan pergerakan manusia dan barang. Jalur tersebut membuka kemungkinan adanya interaksi dengan daerah luar. Namun demikian, intensitas interaksi tersebut kemungkinan tidak terlalu tinggi. Sebagian jalur hanya berfungsi sebagai penghubung lokal, bukan jalur utama yang ramai dilalui. Kondisi ini menempatkan Cireundeu dalam posisi yang cukup unik. Di satu sisi, wilayah ini memiliki akses ke luar. Di sisi lain, ia tetap mempertahankan jarak tertentu dari pusat keramaian. Situasi seperti ini sering kali mendukung keberlangsungan budaya lokal. Masyarakat tetap mengenal pengaruh luar, tetapi tidak sepenuhnya terserap oleh perubahan tersebut. Hal ini memberi ruang bagi tradisi untuk tetap bertahan.

Pada tingkat yang lebih lokal, kondisi geografis juga tercermin dalam pola permukiman dan struktur sosial masyarakat Cireundeu. Kampung ini berada dalam satu wilayah RW yang terdiri dari beberapa RT dengan persebaran penduduk yang tidak terpusat. Permukiman cenderung tersebar mengikuti kondisi lahan yang berbukit. Setiap kelompok rumah menempati area yang memungkinkan untuk dihuni. Pola ini menunjukkan adanya penyesuaian langsung terhadap kondisi alam. Berbeda dengan kawasan perkotaan yang padat dan terstruktur, Cireundeu berkembang secara lebih organik. Selain itu, komposisi masyarakat juga menunjukkan adanya keberagaman dalam satu wilayah, terutama dalam hal kepercayaan. Sebagian masyarakat beragama Islam, sementara sebagian besar lainnya masih memegang kepercayaan Sunda Wiwitan.²² Persebaran kelompok ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok kecil. Meskipun demikian, interaksi sosial tetap berlangsung secara harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, tetapi juga hubungan sosial. Lingkungan yang terbagi secara alami mendorong terbentuknya komunitas yang beragam namun tetap terhubung.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan nama “Cireundeu” yang tidak hanya merujuk pada satu lokasi tertentu. Nama ini cukup umum ditemukan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Hal ini berkaitan dengan keberadaan tanaman reundeu yang tumbuh di berbagai daerah di Tanah Pasundan. Akibatnya, terdapat beberapa tempat dengan nama yang sama tetapi berbeda lokasi. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan dalam penelusuran sumber sejarah. Tidak semua sumber memberikan penjelasan yang rinci mengenai lokasi yang dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan data historis. Dalam konteks geografis, hal ini menunjukkan bahwa penamaan wilayah sering kali dipengaruhi oleh kondisi alam. Lingkungan yang memiliki karakter serupa cenderung menghasilkan penamaan yang sama. Namun dalam kajian sejarah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti. Diperlukan kemampuan untuk

²² Adnan dan Solihin, “Keyakinan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi,” *Jurnal Socio-Politica* 8, no. 1 (2018): hlm, 22-23

membedakan lokasi berdasarkan konteks yang ada. Dalam penelitian ini, Cireundeu yang dimaksud merujuk pada wilayah yang berada di Kota Cimahi.²³

Kondisi sosial masyarakat Kampung Adat Cireundeu pada tahun 1918 tidak dapat dilepaskan dari situasi masyarakat pedesaan di wilayah Bandung bagian barat yang masih berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Kehidupan masyarakat pada masa tersebut berlangsung dalam struktur sosial agraris yang sangat bergantung pada hasil pertanian dan pengelolaan lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁴ Masyarakat Cireundeu pada tahun 1918 sebagian besar bekerja sebagai petani. Aktivitas pertanian menjadi penopang utama kehidupan ekonomi sekaligus membentuk pola interaksi sosial di lingkungan kampung. Hubungan kerja dalam pengolahan lahan dilakukan melalui sistem gotong royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Sunda.

Kehidupan sosial masyarakat pada masa itu masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara manusia, alam, dan leluhur.²⁵ Tahun 1918 menjadi periode penting dalam kehidupan sosial masyarakat Cireundeu karena pada masa tersebut mulai berkembang pengaruh ajaran Sunda Wiwitan yang dibawa oleh Pangeran Madrais. Kehadiran ajaran tersebut memberikan warna tersendiri dalam pembentukan identitas sosial masyarakat setempat. Kepercayaan Sunda Wiwitan yang berkembang di Cireundeu menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Pandangan tersebut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan secara bijaksana serta menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.

Pola kehidupan masyarakat pada masa itu masih bersifat komunal. Kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Setiap

²³ M. Falah, *Cireunde: Perspektif Historis, Sosio-Budaya, dan Ekonomi* (Cimahi: Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, 2024), hlm. 27-28.

²⁴ P. Listiaji, "Kampung Adat Cireundeu, Singkong sejak 1918," *Agenda Indonesia*, 19 Maret 2026, <https://www.agendaIndonesia.com/kampung-adat-cireundeu-singkong-sejak-1918/?utm>.

²⁵ Adnan dan Solihin, "Keyakinan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi," *Jurnal Socio-Politica* 8, no. 1 (2018): hlm, 11

kegiatan sosial, mulai dari pembangunan rumah hingga kegiatan pertanian, dilaksanakan melalui kerja sama antarwarga. Struktur sosial masyarakat Cireunde menunjukkan adanya penghormatan yang tinggi kepada tokoh adat dan sesepuh kampung. Kedudukan mereka sangat penting karena berperan sebagai penjaga nilai-nilai leluhur sekaligus pemimpin dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.²⁶ Kehidupan sosial masyarakat tahun 1918 juga ditandai dengan hubungan kekeluargaan yang erat. Ikatan keluarga besar menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Proses pewarisan pengetahuan lebih banyak dilakukan melalui keluarga dan komunitas adat. Nilai-nilai budaya diajarkan secara lisan dari generasi ke generasi. Tradisi lisan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui cerita, nasihat, dan petuah para sesepuh, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai norma sosial, adat istiadat, dan sejarah leluhur mereka.



Gambar 2.2 Hubungan Antara Budaya, Perilaku, Sistem Aktivitas dan Sistem Setting²⁷

Sebelum terjadinya perubahan pola konsumsi, masyarakat Cireunde hidup dalam budaya agraris Sunda yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan keselarasan dengan alam. Nilai-nilai tersebut

²⁶ Nadya Sherlinda dan Y. Basuki Dwisusanto, “Konsistensi Masyarakat Adat terhadap Tatanan Fisik Spasial Desa Adat Cireunde Cimahi Selatan,” *Jurnal RISA (Riset Arsitektur)* 7, no. 3 (2023): hlm. 271

²⁷ Haryadi dan B. Setiawan, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku* (Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 24

membentuk cara pandang masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar. Pandangan hidup tersebut kemudian memengaruhi perilaku dan aktivitas masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. Kondisi geografis Cireundeu yang berbukit serta keterbatasan lahan sawah menyebabkan masyarakat mengembangkan pola adaptasi yang sesuai dengan lingkungan setempat. Aktivitas pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta kehidupan komunal yang kuat membentuk sistem sosial yang relatif mandiri dan mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan.

2.2 Kondisi Pangan Masyarakat Cireundeu Sebelum 1918

Pada periode sebelum tahun 1918, kondisi pangan masyarakat Kampung Adat Cireundeu dapat dipahami sebagai bagian dari pola hidup masyarakat tradisional yang sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketersediaan pangan bukan semata ditentukan oleh preferensi, tetapi lebih kepada apa yang bisa ditanam, diolah, dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, untuk memahami kondisi pangan masyarakat Kampung Adat Cireundeu sebelum tahun 1918, perlu terlebih dahulu melihat gambaran umum pola konsumsi masyarakat Nusantara pada masa pra-kolonial hingga awal kolonial. Dalam banyak kajian sejarah pangan, terlihat bahwa kebutuhan makanan masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial, dan budaya yang mengitarinya.²⁸ Masyarakat lokal pada umumnya menyesuaikan jenis pangan dengan ketersediaan sumber daya di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola makan bukan sesuatu yang statis, melainkan hasil dari proses panjang adaptasi. Dalam konteks masyarakat tradisional seperti Cireundeu, ketergantungan pada alam menjadi faktor utama dalam menentukan jenis makanan yang dikonsumsi.

Sebelum adanya intervensi besar dari sistem kolonial modern, masyarakat cenderung hidup dengan pola subsisten. Mereka mengolah dan mengonsumsi apa yang tersedia di lingkungan sekitar tanpa banyak bergantung pada distribusi pasar

²⁸ Y. B. P. Santosa dan H. Irawan, "Sejarah Perkembangan Makanan Indonesia dari Abad ke-10 hingga Masa Pendudukan Jepang," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 9, no. 1 (2023): hlm. 114-115.

yang luas. Kondisi ini membuat pola pangan lebih sederhana namun relatif stabil. Pola konsumsi masyarakat sebelum tahun 1918 memperlihatkan bahwa orientasi utama masyarakat bukanlah akumulasi ekonomi, melainkan keberlangsungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan konsep *subsistence ethic* James C. Scott yang menjelaskan bahwa masyarakat tradisional lebih menekankan keamanan pangan minimum dibandingkan keuntungan pasar. Selain itu, praktik pertanian dan pengolahan makanan masih dilakukan secara tradisional. Tidak banyak variasi teknik pengolahan, sehingga makanan yang dihasilkan cenderung sederhana. Namun justru dari kesederhanaan itu terlihat adanya konsistensi dalam pola konsumsi.

Dalam praktiknya, masyarakat Nusantara pada masa tersebut sangat bergantung pada sumber karbohidrat utama yang tersedia di wilayah masing-masing. Beras memang telah dikenal luas sebagai bahan pangan penting, tetapi tidak semua masyarakat menjadikannya sebagai makanan pokok. Di beberapa wilayah, terutama yang kondisi geografisnya tidak mendukung pertanian padi, masyarakat lebih mengandalkan umbi-umbian.²⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa konsumsi beras pada masa lalu juga memiliki dimensi sosial. Dalam beberapa catatan sejarah, beras bahkan dianggap sebagai komoditas bernilai tinggi yang tidak selalu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua komunitas menjadikan nasi sebagai makanan utama sehari-hari. Sebaliknya, mereka mengembangkan pola konsumsi alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan.

Dalam kehidupan sehari-hari, makanan pokok menjadi bagian yang paling penting dalam pola konsumsi. Fungsinya sederhana, yaitu sebagai sumber energi untuk menjalankan aktivitas. Masyarakat tidak terlalu memikirkan kandungan gizi secara ilmiah, tetapi mereka memiliki pengetahuan praktis tentang makanan. Mereka tahu mana yang mengenyangkan, mana yang bisa bertahan lama, dan mana yang mudah diolah.³⁰ Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman, bukan dari

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Tradisi dan Kebiasaan Makan pada Masyarakat Tradisional di Jawa Tengah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997), hlm. 26

³⁰ *Ibid.*, hlm. 28

pendidikan formal. Dalam banyak kasus, makanan diolah dengan cara yang sederhana. Direbus, dikukus, atau dibakar. Teknik-teknik ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada upaya untuk membuat makanan menjadi terlalu rumit. Justru kesederhanaan menjadi ciri utama. Hal ini juga berkaitan dengan keterbatasan alat dan bahan. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi menjadi hal yang penting.

Beras merupakan makanan pokok utama masyarakat Cireunde sebelum 1918. Posisi beras sangat dominan karena berkaitan dengan budaya agraris Sunda yang memandang padi sebagai simbol kehidupan, kemakmuran, dan kesuburan. Keberadaan padi dalam kehidupan masyarakat Sunda memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Berbagai mitologi mengenai Nyi Pohaci Sanghyang Sri atau Dewi Sri menunjukkan bahwa masyarakat memandang padi sebagai anugerah suci yang harus dihormati.³¹ Kepercayaan tersebut berkembang luas di wilayah Jawa Barat dan menjadi landasan budaya pertanian masyarakat Sunda selama berabad-abad. Kondisi demikian juga ditemukan di wilayah Cireunde yang secara geografis berada dalam lingkungan budaya Sunda. Sebelum mengenal singkong sebagai pangan utama, masyarakat setempat mengonsumsi beras sebagaimana masyarakat pedesaan lainnya di Priangan. Masyarakat Cireunde pada masa itu hidup dalam struktur ekonomi pedesaan yang sederhana. Sebagian besar kebutuhan pangan diperoleh melalui hasil pertanian sendiri. Hubungan antara produksi dan konsumsi berlangsung secara langsung sehingga keberhasilan panen menjadi faktor penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Ketergantungan terhadap padi sebenarnya tidak hanya terjadi di Cireunde, tetapi hampir di seluruh Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Belanda bahkan menjadikan produksi beras sebagai salah satu indikator penting dalam pengelolaan ekonomi pedesaan karena berhubungan langsung dengan stabilitas sosial masyarakat.

Sebelum pada akhirnya Masyarakat Cireunde memilih singkong sebagai makanan pokok, Masyarakat Cireunde sempat memilih jagung dan hanjeli sebagai

³¹ S. Margono dkk., *Sejarah Pangan di Indonesia: Strategi dan Politik Pangan dari Masa Kolonial sampai Reformasi* (Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2010), hlm. 20-23.

makanan pokok.³² Jagung telah lama dikenal masyarakat Jawa Barat sejak masa kolonial dan sering digunakan sebagai pangan tambahan ketika persediaan beras berkurang. Di berbagai daerah pedesaan Priangan, jagung dikonsumsi dalam bentuk nasi jagung atau dicampur dengan beras untuk menghemat persediaan pangan keluarga. Bagi masyarakat pedesaan yang menghadapi keterbatasan produksi padi, jagung menjadi alternatif penting karena lebih mudah dibudidayakan pada lahan kering dibandingkan padi sawah.

Selain makanan pokok, masyarakat juga mengonsumsi lauk-pauk yang berasal dari lingkungan sekitar. Namun, jumlah dan variasinya tidak selalu banyak. Lauk sering kali hanya berfungsi sebagai pelengkap. Dalam beberapa kondisi, bahkan tidak selalu tersedia.³³ Hal ini menunjukkan bahwa konsep makan pada masa itu berbeda dengan sekarang. Tidak harus lengkap atau beragam yang penting cukup untuk mengisi tenaga. Dalam kesehariannya, masyarakat lebih fokus pada fungsi makanan daripada variasinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Makanan bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi secara berlebihan, tetapi ada batasan yang cukup jelas. Dalam situasi seperti ini, masyarakat cenderung lebih hemat dan tidak membuang makanan.

Kondisi pangan juga sangat dipengaruhi oleh musim dan hasil panen. Ketika panen berhasil, ketersediaan makanan relatif aman. Namun, ketika terjadi gagal panen, masyarakat harus menghadapi keterbatasan. Dalam situasi seperti ini, cadangan pangan menjadi sangat penting. Masyarakat biasanya menyimpan sebagian hasil panen untuk digunakan di kemudian hari. Proses penyimpanan ini dilakukan dengan cara-cara tradisional, seperti dikeringkan atau diawetkan. Dalam kondisi tertentu, masyarakat juga harus menyesuaikan pola makan mereka. Jumlah makanan bisa dikurangi, atau jenis makanan diganti dengan yang lebih mudah didapat. Hal ini menjadi bagian dari strategi bertahan hidup yang sudah biasa dilakukan.

³² Eman Suherman, "Masyarakat Adat Kampung Cireunde (1964-2010)" (Skripsi sarjana, Universitas Padjadjaran, 2017), hlm. 61-62

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Tradisi dan Kebiasaan Makan pada Masyarakat Tradisional di Jawa Tengah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997), hlm. 78.

2.3 Filosofi Hidup dan Strategi Adaptif Masyarakat Cireundeu 1918

Masyarakat Kampung Adat Cireundeu memiliki pandangan hidup yang berakar pada ajaran karuhun Sunda, terutama nilai keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dalam konsep ajaran, ketiga nilai tersebut disebut dalam suatu konsep spiritual yaitu Tri Tangtu. Dalam konteks sejarah awal abad ke-20, terutama sekitar tahun 1918-1924, pola kehidupan masyarakat Cireundeu mulai menunjukkan bentuk adaptasi yang khas terhadap tekanan sosial maupun kondisi pangan pada masa kolonial. Akan tetapi, adaptasi tersebut tidak dilakukan dengan meninggalkan identitas budaya mereka. Justru, nilai-nilai lokal dijadikan sebagai dasar untuk bertahan hidup. Dalam kajian mengenai masyarakat Sunda, disebutkan bahwa falsafah hidup orang Sunda diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral sekaligus membentuk hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu pandangan penting dalam budaya Sunda ialah bahwa alam harus dirawat dan dimanfaatkan secukupnya, bukan dieksploitasi secara berlebihan.³⁴ Pandangan seperti ini tampak sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Cireundeu yang sejak awal menggantungkan hidup pada hasil pertanian.

Karakter masyarakat Sunda sendiri dikenal dengan prinsip cageur, bageur, bener, singer, dan pinter. Nilai tersebut menggambarkan pentingnya hidup sehat, berbuat baik, berlaku benar, memiliki kesadaran diri, serta kemampuan berpikir bijak.³⁵ Dalam masyarakat Cireundeu, prinsip-prinsip semacam itu tidak hadir dalam bentuk teori tertulis, melainkan tampak dalam perilaku sosial masyarakatnya. Misalnya, dalam kehidupan bersama mereka lebih mengutamakan gotong royong dan menjaga keseimbangan dengan alam dibandingkan mengejar keuntungan individual.

Filosofi ini tidak lahir sebagai konsep abstrak, melainkan tumbuh dari pengalaman historis masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan

³⁴ E. R. Juningsih, U. Wahyudin, dan P. Subekti, "Falsafah Sunda sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga dalam Melestarikan Lingkungan," dalam *Komunikasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*, ed. I. Bakti, S. Sumartias, dan P. Subekti (Bandung: Unpad Press, 2020), hlm. 5.

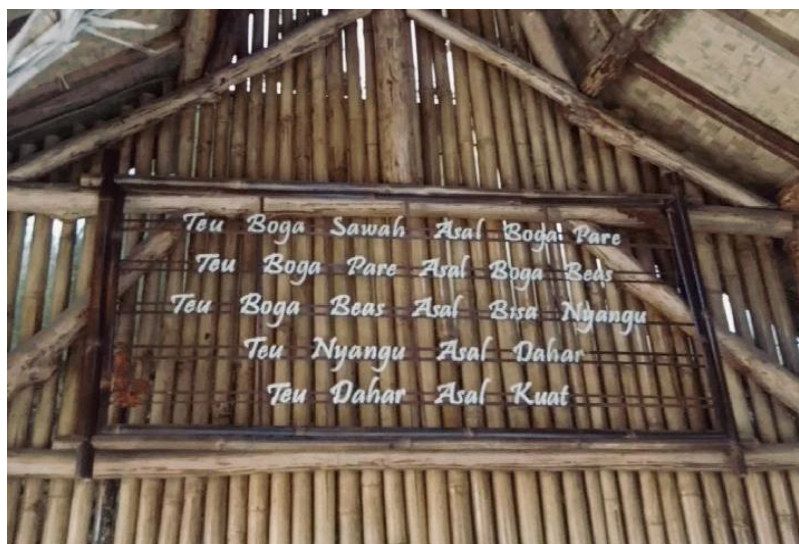
³⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

ekonomi yang terjadi sejak awal abad ke-20. Periode 1918 menjadi fase penting karena pada masa tersebut masyarakat Cireundeu mulai menegaskan pilihan hidup yang berbeda dari arus utama masyarakat Jawa dan Sunda yang menjadikan beras sebagai makanan pokok. Pilihan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa ketahanan hidup harus dibangun dari kemampuan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di lingkungan sendiri.

Pandangan hidup masyarakat Cireundeu bertumpu pada prinsip:

“teu boga sawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal dahar, teu dahar asal kuat”

Ungkapan tersebut disampaikan sesepuh kampung Cireundeu kala itu, Mama Haji Ali dan Abu Sepuh yang mengandung makna bahwa kesejahteraan tidak diukur dari kepemilikan sawah atau padi, melainkan dari kemampuan mempertahankan kehidupan melalui cara apa pun yang sesuai dengan kondisi yang ada. Nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah kemandirian, kesederhanaan, dan daya tahan.³⁶ Dalam perspektif budaya Sunda, konsep tersebut menunjukkan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam, bukan memaksakan alam mengikuti keinginannya.



Gambar 2.3 Kalimat Prinsip Hidup Masyarakat Cireundeu

³⁶ F. T. Fhasca dan T. K. Wirakusumah, “Falsafah Sunda Kampung Adat Cireundeu dan Pengembangan Ekowisata,” dalam *Komunikasi Multikultur dalam Konteks Pariwisata*, ed. U. L. S. Khadijah, E. Novianti, dan L. Khoerunnisa (Bandung: Unpad Press, 2020), hlm. 111.

Falsafah tersebut memperlihatkan cara berpikir masyarakat Cireundeu yang cukup lentur dalam menghadapi perubahan. Mereka tidak terjebak pada simbol pangan tertentu seperti nasi, tetapi lebih menekankan fungsi pangan sebagai sumber kehidupan. Cara berpikir seperti ini muncul karena masyarakat Cireundeu menyadari bahwa kondisi sosial dan alam dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, ketahanan hidup harus dibangun melalui kemampuan beradaptasi.

Filosofi hidup yang dianut masyarakat Cireundeu tidak berhenti pada tataran nilai, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata ketika menghadapi krisis pangan yang mulai dirasakan sekitar tahun 1918. Adaptasi pertama yang dilakukan adalah diversifikasi pangan melalui pemanfaatan singkong sebagai sumber karbohidrat utama pengganti beras. Pada masa tersebut, harga beras mengalami kenaikan akibat terganggunya distribusi pangan di Hindia Belanda yang dipengaruhi situasi Perang Dunia I. Kondisi ini mendorong masyarakat mencari sumber pangan yang lebih mudah dibudidayakan dan tidak bergantung pada pasokan pasar. Singkong dipilih karena mampu tumbuh pada lahan kering berbukit yang banyak terdapat di kawasan Cireundeu serta memiliki daya tahan yang lebih baik dibanding padi terhadap kondisi lingkungan yang tidak menentu. Peralihan menuju singkong bukan sekadar pergantian bahan makanan, tetapi merupakan bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Dalam catatan sejarah Kampung Adat Cireundeu, tokoh adat seperti Haji Ali dan Omah Asnamah mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan mulai memanfaatkan singkong sebagai pangan pokok sejak tahun 1918. Langkah tersebut menjadi strategi kolektif untuk menghadapi ancaman kelangkaan pangan sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dari sumber daya lokal.

Filosofi tersebut semakin dipertegas oleh ajaran “*Ngindung ka Waktu, Mibapa ka Zaman*” yaitu sikap hidup yang menghormati tradisi leluhur sambil tetap terbuka terhadap perubahan zaman. Menurut Jakob Sumardjo, masyarakat adat Sunda memiliki karakter budaya yang lentur, yakni mampu menerima unsur-unsur

baru tanpa meninggalkan prinsip dasar yang diwariskan oleh nenek moyang.³⁷ Dalam konteks Cireundeu, ajaran ini tercermin dalam keputusan masyarakat untuk memanfaatkan singkong sebagai bahan pangan pokok. Singkong merupakan tanaman yang berasal dari Brazil dan diperkenalkan ke Nusantara pada masa kolonial, tetapi kemudian diolah sesuai dengan nilai budaya lokal sehingga menjadi bagian dari identitas masyarakat. Pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Cireundeu tidak sepenuhnya menutup diri terhadap perubahan sosial yang terjadi pada masa kolonial.

Masyarakat Cireundeu masih mempertahankan adat dan kepercayaan Sunda Wiwitan, tetapi pada saat yang sama tetap membuka ruang penyesuaian terhadap kebutuhan hidup. Dalam hal ini, adaptasi masyarakat bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan menyesuaikan tradisi agar tetap relevan dengan situasi baru. Karena itu, ketika masyarakat mulai menjadikan singkong sebagai pangan utama, perubahan tersebut akhirnya diterima sebagai bagian dari strategi kolektif untuk mempertahankan keberlangsungan komunitas. Selain dalam aspek pangan, strategi adaptif masyarakat Cireundeu juga tampak dalam pengelolaan lingkungan. Kawasan hutan dibagi ke dalam beberapa fungsi, seperti leuweung larangan, leuweung tutupan, dan leuweung baladahan.³⁸ Pembagian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran ekologis yang cukup kuat. Hutan tidak dipandang hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga bagian penting dari keseimbangan hidup masyarakat. Leuweung larangan misalnya, dijadikan kawasan yang tidak boleh dirusak karena berfungsi menjaga sumber air bagi masyarakat. Sementara itu, leuweung tutupan digunakan untuk reboisasi sehingga pemanfaatan hutan tetap disertai kewajiban menanam kembali pohon yang ditebang. Pola seperti ini menunjukkan bahwa strategi bertahan hidup masyarakat Cireundeu sebenarnya dibangun melalui hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Selain itu, strategi adaptif masyarakat Cireundeu juga terlihat pada pola sosial mereka yang relatif terbuka. Transformasi nilai-nilai masyarakat adat

³⁷ J. Sumardjo, *Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun Sunda*, versi digital (Jakarta: Kelir/Harpa, 2012), hlm. 50-51

³⁸ F. T. Fhasca dan T. K. Wirakusumah, *Loc. Cit.*, hlm. 111.

Cireundeu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sikap terbuka terhadap perubahan selama perubahan tersebut tidak menghilangkan inti ajaran leluhur.³⁹ Dengan demikian, adaptasi masyarakat Cireundeu pada periode 1918 tidak hanya berupa perubahan konsumsi dari beras ke singkong. Adaptasi tersebut mencakup penyesuaian pola produksi pertanian, penguatan solidaritas sosial, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keseluruhan strategi ini menunjukkan bahwa falsafah “*Ngindung ka Waktu, Mibapa ka Zaman*” diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menghadapi krisis tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur.

³⁹ P. Nurharyanto, D. Wildan, dan M. N. Alia, *Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cireundeu* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), hlm. 3-4.